

**KINERJA PT.PLN (PERSERO) WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2012-2014 (STUDI KASUS:KRISIS LISTRIK DI KOTA PEKANBARU)**

By : Yoki Alvetro
y_vedros@rocketmail.com
Supervisor: Dr. Hasanuddin, M.Si
Library of Riau University

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In 2013 Pekanbaru as the Capital City of Riau Province has electricity crisis. It caused powering outages to be brought by a pet until twelve hours in a day. UU No. 30 of 2009 Pasal 29 explained customer deserve a good service and get good quality electric power continuously. PT.PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau that given a responsibility in provide electric power in Pekanbaru city said that condition is caused dry season and destruction one of power plants in Ombilin which become one of power plants in interconnection system Riau province. The crises that happen for long time make all of society asking about PT.PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau performance in providing electric power in Riau province.

The method of this research is qualitative method that is not using numbers data but explanation that describe a situation, process, and particular condition. The techniques of data collection use documentation and interview technique. The result of the research describe the performance of PT.PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau is not good caused on of indicator performances is outcomes. This case is proved by many power plants has not finished on time and PT.PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau unfocus to solve this crises cause fear of management to take decision while crises happen.

Keyword : Electricity crisis, PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, performance

1.PENDAHULUAN

Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa. Dalam kaitan diatas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.¹

PT.PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidangnya penyediaan listrik bagi masyarakat. PT.PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau mengemban suatu amanah besar bagi pelayan kelistrikan bumi Lancang Kuning ini. Perubahan kearah pernaikan pelayanan pun terus dilakukan, antara lain dengan dilakukannya perubahan Organisasi PLN di Riau, yaitu dengan adanya Keputusan Presiden No.139 Tahun 1998 Tanggal 11 September 1998 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero). PLN telah menertibkan keputusan Direksi No.113.K/010/DIR/2001 Tanggal 25 Mei 2001 sehingga PLN wilayah III berubah status menjadi PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Sumbar Riau termasuk didalamnya pembentukan Wilayah Usaha Riau. Kemudian PT.PLN (persero) Wilayah Sumbar Riau dipisah menjadi PT.PLN (Persero) Wilayah Sumbar dan PT.PLN (Persero) Wilayah Riau yang berdiri sendiri sesuai Keputusan Direksi No.089.K/010/DIR/2002 Tanggal 2 Juli 2002 tentang Perubahan Pengorganisasian Unit Bisnis di Lingkungan PT.PLN (

Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau. Sekarang PT.PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau telah memiliki empat kantor, yaitu Kantor Wilayah, kantor Cabang Pekanbaru, Kantor Cabang Tanjung Pinang, Kantor Cabang Dumai, dan Kantor Cabang Rengat.²

Dengan pembentukan Organisasi PT.PLN (persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau ini, diharapkan percepatan peningkatan pelayanan kelistrikan di Bumi Lancang Kuning ini dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap berfokus pada sistem manajemannya yang berbasis pada kepuasan pelanggan.³ Tetap pada mengutamakan pelayanan yang baik bagi seluruh masyarakat.

Wilayah Sumatera mengalami krisis listrik sejak pertengahan tahun 2013. Khusus di wilayah provinsi Riau keadaan krisis semakin memprihatinkan. Byar pet hingga 8 jam, dan mulai mengganggu kehidupan sosial hingga ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan penduduk yang pesat sebenarnya juga menjadi masalah utama dalam pemenuhan kebutuhan listrik, tetapi itu harus diantisipasi oleh PLN karena secara sosiologis penduduk akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Meningkatnya pertumbuhan penduduk akan berbanding lurus dengan kebutuhan tenaga listrik serta pertumbuhan investasi di Provinsi Riau serta Kota Pekanbaru yang menmbus 6% lebih per tahun tentu menjadi salah satu faktor perbandingan kebutuhan tenaga listrik.

Sesuai hal tersebut, pelanggan akan terus meningkat karena listrik sudah menjadi sendi kehidupan bagi masyarakat sekarang ini, Baik dalm beraktivitas rumah tangga, tempat kerj, sekolah serta untuk kepentingan umum pun akan menggunakan tenaga listrik.

¹Undang-Undang 19 Tahun 2003.

²www.ptpln.or.id

³ibid

Semenjak awal Juli tahun 2013 Provinsi Riau mengalami pemadaman listrik. Pemadaman bisa 2-3 kali sehari dengan durasi 2-3 jam. Keluhan masyarakat hingga unjuk rasa sudah berulang kali dilakukan, tetapi tidak kunjung ada perbaikan oleh PLN.⁴

PT. PLN Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau (WRKR) berdalih kondisi krisis listrik di Riau disebabkan oleh kondisi cuaca yang jarang hujan sehingga mengurangi debit air di PLTA Koto Panjang berkurang. Selain itu, mereka juga berdalih bahwa rusaknya turbin di PLTA Ombilin di Sumatera Barat juga menjadi penyebab terjadinya krisis listrik di Riau.

Selain itu kondisi krisis ini terjadi karena sistem Provinsi Riau deficit 120 MW. Ini dapat dilihat pada table di bawah ini. Yaitu :

Tabel 1.2
Kelistrikan Interkoneksi Sumatera

Sistem	Daya mampu pembangkit	Beban puncak	Defisit
RIAU	286	452	166
SUMBAR	299	438	139
JAMBI	201	266	65
SUMBAG TENG	786	1156	370
TRANSFER DARI SUMBAGSEL			248
DEFISIT DAYA SUMBAGTENG (SAAT INI)			120

Sumber : PT.PLN Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau.

Terkadang PLN juga terlihat tidak memperhatikan hak-hak konsumen⁵ (Sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No : 30

Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan) dimana konsumen berhak untuk :

- Mendapatkan pelayanan yang baik.
- Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.
- Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar) Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik
- Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- Akan tetapi fenomena yang ada menunjukkan bahwa kinerja PT.PLN membuat masyarakat terutama konsumen listrik merasa kecewa ini karena saat krisis pemadaman dilakukan tanpa pemberitahuan. Kemarahan masyarakat Riau terhadap pemadaman listrik hingga 12 jam sehari yang tak kunjung ada solusinya, kegundahan masyarakat semakin memuncak. Selain aksi demo menuntut dan mengecam kebijakan PLN melakukan pemadaman bergilir yang tak henti-hentinya.
- Tuntutan pun datang kepada PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR)

⁴ Tribunnews.com tanggal 16 Oktober 2013

⁵ UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

akan kinerjanya. Aliansi Rakyat Riau Berdaulat (ARRB) mengindikasikan kerugian masyarakat akibat krisis listrik di Provinsi Riau mencapai Milyaran rupiah.⁶

Selain itu, anggota DPR RI Dapil Riau Sutan Sukarnotomo mengatakan bahwa rapat Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT.PLN menyetujui dan mendorong untuk menyewa genset untuk mengatasi krisis listrik di Provinsi Riau. Seharusnya tekanan-tekanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh PT.PLN dalam mengatasi krisis yang ada.

Berdasarkan data yang penulis kumpulkan dari PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Saat ini sistem Riau memiliki beberapa pembangkit yang beroperasi diantaranya:

1. PLTA Koto Panjang
2. PLTD Teluk Lembu
3. PLTG Teluk Lembu
4. PLTMD Teluk Lembu
5. PLTD Dumai
6. PLTG Balai Pungut
7. PLTMD Balai Pungut

Selain pembangkit yang ada, PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau telah merencanakan pembangunan pembangkit baru yang akan penulis bahas di pembahasan penelitian ini

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui kinerja PT.PLN Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau dalam menangani krisis listrik yang melanda di Provinsi Riau pada tahun ini dengan judul penelitian :

“ KINERJA PT.PLN (Persero) WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012-2014(Studi Kasus: Krisis Listrik di Kota Pekanbaru)”

2.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah:

1. Bagaimana kinerja PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau tahun 2012-2014 dalam mengantisipasi dan mengatasi krisis listrik di kota Pekanbaru?
2. Mengapa PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau lambat dalam mengatasi krisis?

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 KINERJA PT.PLN (Persero) WILAYAH RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan dinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan dengan visi yang diemban oleh suatu organisasi serta untuk mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Dengan adanya informasi mengenai kinerja suatu instansi pemerintah, akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama dan tugas pokok instansi, bahan untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan (persentase pencapaian misi) instansi untuk memutuskan suatu tindakan serta kebijakan yang ingin diambil. Kinerja digunakan manajemen untuk melakukan penilaian secara periode mengenai efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria, yang telah ditetapkan sebelumnya.

PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat.

⁶www.berisasatu.com tanggal 07 oktober 2013

Provinsi Riau menjadi wilayah kerja yang diterima oleh PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Pengukuran kinerja terhadap salah satu instansi ini dirasa sangat perlu agar tingkat pelayanan yang diberikan menjadi lebih baik. Sesuai dengan Undang-Undang Kelistrikan yang menganjurkan bahwa pelanggan atau konsumen harus mendapatkan kualitas pelayanan kelistrikan yang terbaik.

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah kerja dan tanggung jawab PT.PLN wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Tanggung jawab yang diberikan harus berbanding lurus dengan pelayanan yang harus tetap juga diperbaharui kearah yang lebih baik serta pengoptimalan pelayanan yang diberikan.

Krisis listrik di Provinsi Riau berdampak besar bagi Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau. Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi baik pertumbuhan dari kelahiran maupun pendatang. Berdasarkan data dari Bappeda, Pekanbaru mengalami pertumbuhan sekitar 3,20% per tahun.

Sebagai salah satu kota atau daerah yang terkena dampak dari krisis listrik tersebut membuat masyarakat sangat marah dan sangat dirugikan. Kemarahan masyarakat tergambar dari pemberitaan dan aksi masyarakat dalam menanggapi krisis yang ada dan pihak PLN sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengadaan tenaga listrik untuk Kota Pekanbaru.

Berbagai tuntutan dan tekanan seiring adanya pemadaman listrik di Kota Pekanbaru mengalir kepada pihak PLN. Berdasarkan informasi yang penulis kumpulkan dari berbagai media salah satunya datang dari Anggota DPRD Provinsi Riau, Bapak Aziz Zainal. Beliau meminta

PLN agar memberikan solusi lain kepada masyarakat agar tidak terjadi pemadaman.

Selain itu pada tahun 2013, anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru juga sudah mengadakan *hearing* dengan pihak PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dengan dihadiri oleh jajaran PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau serta GM, Doddy Benjamin Pangaribuan. Dalam *hearing* tersebut GM sangat yakin krisis akan bisa teratasi pada Oktober 2013. Namun krisis di Kota Pekanbaru tetap terjadi pemadaman.

Penentuan kinerja suatu instansi, menurut Mahsun (2006: 77-78) ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja tersebut. Diantaranya:

3.1.1 Masukan (*input*)

Indikator masukan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan untuk menghasilkan keluaran. Dalam suatu organisasi dan instansi, masukan menjadi sangat diperlukan agar proses organisasi dapat berjalan serta bisa diproses menjadi sebuah *output*.

Sistem politik yang dicanangkan oleh David Easton menyebutkan bahwa masukan (*input*) tersebut terdiri dari dua yakni:

a. Tuntutan (*Demand*)

Tuntutan merupakan permintaan yang diinginkan dan dilaksanakan agar terjadi suatu kondisi yang lebih baik.

b. Penghargaan (*Support*)

Hal ini berkenaan dengan bentuk apresiasi dari hal-hal baik yang telah dilakukan. *Support* bertujuan untuk

mendorong instansi yang bersangkutan agar kinerja lebih maksimal untuk kedepannya.

Hasil wawancara penulis dengan pihak PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau menyebutkan, tuntutan terhadap PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau hampir diterima setiap hari oleh pihak PLN seandainya jika ada program pemadaman. Media yang banyak digunakan yakni via telfon.

3.1.2 Proses (*Process*)

Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator proses menggambarkan perkembangan dan aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam mengolah masukan menjadi keluaran. Proses merupakan komponen utama bagi organisasi dalam upayanya dalam mencapai apa yang ingin dicapainya dalam perumusan perencanaan strategis. Indikator proses merupakan ukuran tingkat efisiensi organisasi dalam menjalankan aktivitas organisasi keseharian.

PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau melakukan upaya pengelolaan masukan (*input*) dengan melakukan rapat-rapat rangka perumusan kebijakan dalam bentuk perencanaan jangka panjang dan jangka pendek dalam keadaan yang sangat diperlukan.

Pada indikator proses ini, PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau berupaya memproses tuntutan yang datang dari berbagai pihak. Bukan hanya tuntutan yang datang dari masyarakat pelanggan listrik tetapi juga pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Pekanbaru sebagai wakil rakyat.

Masukan berupa tuntutan yang penulis tulis dalam penelitian ini seakan tidak diperlukan. Hal ini terbukti dengan adanya pernyataan bahwa PLN hanya bisa menjelaskan keadaan. Selain itu PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau telah memiliki program perencanaan yang mereka bangun berdasarkan perkembangan pertumbuhan listrik.

3.1.3 Keluaran (*output*)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisa sejauh mana kegiatan telah terlaksana sesuai rencana. Indikator keluaran hanya dapat menjadi landasan untuk menilai kemampuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh proses yang dilaksanakan oleh PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dapat dilihat dari perencanaannya. Berdasarkan teori Benadin dan Russel, bahwa kinerja dapat dilihat bagaimana suatu organisasi dalam mencapai tujuan/rekor produksi akhir pada suatu aktivitas organisasi atau fungsi kerja khusus pada suatu periode tertentu. Teori tersebut didukung oleh teori Mahsun (2006:77-78) bahwa ada beberapa indikator dalam menentukan kinerja organisasi yakni: masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), hasil, manfaat, serta dampak.

Teori Bernadin dan Russel serta Mahsun tersebut mengantarkan penulis kepada perlunya melihat segi-segi yang berhubungan dengan teori tersebut, diantaranya perencanaan. Perencanaan

organisasi merupakan suatu hal yang penting karena akan menentukan arah kerja organisasi itu sendiri. Dalam hal ini PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau sebagai salah satu Badan Usaha Miliki Negara dan bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga listrik di Provinsi Riau. Perencanaan PT. PLN dituangkan didalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disusun berdasarkan perkembangan kebutuhan tenaga listrik. Perencanaan tersebut disusun dalam jangka panjang (10 tahun) serta jangka pendek (5 tahun).

3.1.4 Hasil (*outcomes*)

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu tertentu. Tolak ukur ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Pada umumnya para pembuat kebijakan paling tertarik pada tolak ukur ini dibanding tolak ukur lainnya. Namun informasi yang diperlukan untuk mengukur hasil seringkali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh. Oleh karena itu, setiap instansi perlu mengkaji berbagai pendekatan untuk mengukur hasil dari keluaran suatu kegiatan.

Pada Indikator ini, PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dapat dilihat dari pencapaian *output* yang didalam ini berupa perencanaan yang dibuat. Perencanaan dibuat untuk dapat dilakukan dan dilaksanakan serta mendapat hasil dari perencanaan tersebut. Namun perencanaan yang dibuat oleh PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau tidak sepenuhnya mulus terlaksana dikarenakan adanya pihak terkait yang harus dijadikan mitra dalam perencanaan seperti pihak pembangkit, transmisi, dan distribusinya..

3.2 Kinerja PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dalam mengatasi krisis listrik

Didalam teori yang penulis tuangkan pada penelitian ini tentang manajemen krisis, perlu dilakukan beberapa langkah-langkah agar krisis tidak terjadi. Walaupun itu terjadi, tetapi perlu upaya yang kuat dari lembaga atau instansi yang berwenang agar krisis tidak berlarut larut. Sesuai dengan UU tentang Ketenaga Listrikan bahwa pelanggan atau konsumen harus mendapatkan pelayanan listrik yang baik. Dengan kata lain apabila pelanggan yang bersangkutan sudah merasa tidak mendapat pelayan yang baik berarti bisa disebut lembaga terkait dalam hal ini PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau telah melanggar Undang-undang Ketenagalistrikan.

Adapun Langkah-langkah yang harus dijalankan sesuai teori manajemen krisis yakni:

3.2.1 Peramalan Krisis (*forecasting*)

Krisis listrik umumnya diartikan sebagai kondisi listrik yang mengalami kekurangan daya sehingga terjadi pemadaman terhadap pelanggan listrik. Kondisi tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan pemadaman yang dapat berakibat buruk terhadap kepercayaan pelanggan terutama kepada PT.PLN sebagai perusahaan penyedia tenaga listrik.

PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dalam peramalan krisis, sebenarnya krisis sudah diramalkan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kapasitas pembangkit yang ada di sistem Riau memang tidak mencukupi untuk kebutuhan listrik.

Pada perencanaan yang dibuat oleh PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau menggambarkan bahwa beban puncak

penggunaan daya listrik di provinsi Riau tidak sebanding dengan kapasitas pembangkit yang ada. Sistem interkoneksi memungkinkan mendapatkan pasokan daya dari provinsi tetangga.

3.2.2. Pencegahan Krisis (*prevention*)

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mengatasi krisis energi listrik yang terjadi di Kota Pekanbaru khususnya. Langkah yang ditempuh harus secara simultan dan terstruktur. Menjadi hal yang mutlak bagi PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dalam mencegah terjadinya krisis listrik.

Pada Penelitian ini, sesuai hasil wawancara penulis dengan pihak PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, bahwa PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dalam melaksanakan pencegahan krisis listrik yakni dengan penambahan pembangkit. Dengan semakin banyaknya pelanggan listrik, maka secara otomatis penambahan pembangkit menjadi hal yang mutlak.

Namun, pada tahun 2013 Kota Pekanbaru mengalami pemadaman yang cukup lama. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari semua pihak tentang upaya yang dilakukan PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dalam mencegah terjadinya krisis listrik yang melanda kota Pekanbaru. Banyak kalangan yang kecewa terhadap PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau karena pemadaman terus berlanjut.

3.2.3 Intervensi Krisis (*intervansian*)

Krisis yang melanda Kota Pekanbaru telah membuat semua pihak menanyakan akan upaya PLN dalam mengatasi krisis listrik tersebut. Masalah terbesar ketika

seakan tidak ada solusi lain yang dapat dibuat PLN untuk mengatasi krisis tersebut. Pemadaman yang mencapai 8-12 jam per hari membuat masyarakat terutama pelanggan tidak merasa puas dengan pelayanan PLN.

DPRD Kota Pekanbaru sebagai wakil rakyat Kota Pekanbaru mengambil inisiatif untuk mengatasi hal tersebut. Sebagai pemerintah daerah, PLN dalam hal ini PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dipanggil ke DPRD untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan krisis listrik tersebut.

Belum adanya penambahan pembangkit yang diupayakan untuk membuat sistem Riau mengalami defisit daya menjadi salah satu kendala yang dialami oleh pihak PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Pertambahan pembangkit terkendala disebabkan oleh berbagai permasalahan yang dihadapi oleh PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Keadaan krisis di Kota Pekanbaru harus mendapat solusi yang cepat agar pelanggan listrik tidak mengalami hal yang tidak diinginkan, serta kerugian yang lebih banyak. Besarnya tuntutan kepada PLN memang dirasakan oleh pihak PLN itu sendiri.

Berdasarkan hal diatas pihak PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau diharapkan untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi krisis. Dalam hal ini PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau tidak hanya menyerah dengan kondisi yang ada sehingga pelanggan tidak kecewa.

Beberapa langkah dilakukan PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dalam menanggapi krisis diantaranya. Bapak Doddy Benyamin Pangaribuan selaku GM PT.PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dalam sebbuah kesempatan

Seminar Pada tanggal 9 November 2013 memaparkan rencana 5 tahun PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dalam menghadapi kondisi kelistrikan saat krisis.

Tabel 3.11
Rencana jangka 5 Tahun PT.PLN
Wilayah Riau dan Kepulauan Riau

No	Rencana Tambahan Pembangkit	2014	2015	2016	Rencana COD
1	PLTU Tenayan #1		100	100	COD TW I 2016
2	PLTU Tenayan #2		100	100	COD TW II 2016
3	Sewa Garuda Sakti #1(HSD)	50	50	50	COD Jan'14 (Conect di sistem 150kV)
4	Sewa Garuda Sakti #2(HSD)		50	50	COD Jan'15 (Conect di sistem 150kV)
5	Sewa PLTMG - Teluk Lembu	30	30	30	COD Jan'14 (Conect di sistem 150kV)
6	PLTU Sewa Dumai 2 x 120 MW			240	COD TW I 2017
7	PLTMG Balai Pungut (Ex. Belawan)	20	20	20	COD Jan'15

Sumber: PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau

Dari rencana tersebut, proyeksi beroperasi PLTU Tenayan Raya terdapat pada tahun 2016. Sedangkan pada perencanaan awal apad tahun 2012 berdasarkan RUPTL 2012 bahwa jadwal beroperasinya PLTU Tenayan tersebut yakni pada tahun 2013. Pada saat krisis juga PT.PLN dalam menanggapi keluhan pelanggan yang masuk juga hanya bisa menjelaskan keadaan yang ada. Dibalik banyaknya keluhan yang masuk pelanggan merasa tidak ada respon dari masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh PT.PLN(persero) Wialayah Riau dan Kepulauan Riau dalam mengatasi krisis dengan melakukan penambahan pemabangkit agar kebutuhan tenaga listrik bisa terpenuhi. Seiring dengan perencanaan penambahan pembangkit yang dilakukan berbagai kendala dihadapi oleh pihak PT.PLN (persero) Wilayah Riau dan Kepualaun Riau, salah satunya adalah pembebasan lahan untuk pembangunan pembangkit. Lahan yang ditunjuk untuk lokasi pembangunan pembangkit yang disediakan oleh Pemerintah daerah menurut Supervisor Humas merupakan lahan yang bermasalah.

Mengatasi krisis listrik yang terjadi, ada keraguan dan ketakutan yang dialami oleh pihak PT.PLN. hal yang ditakutkan oleh pihak PLN dalam mengambil keputusan yakni adanya nanti inefisiensi anggaran. Ini menyebabkan pihak PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau membutuhkan banyak pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Semisal penyewaan genset dalam skala besar yang dibutuhkan saat krisis. Sehingga saat krisis tahun 2013 PLN Cuma bisa menyewa beberapa pembangkit dalam skala kecil dan itu kurang ber-efek luas.

Sesuai informasi yang penulis himpun dari berbagai media, zaman kepemimpinan bapak Dahlan Iskan sebagai Dirut PT.PLN beliau pernah membuat pernyataan bahwa dalam mengatasi krisis listrik jangan pernah takut dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Karena listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Diharapkan tidak terjadi pemadaman di daerah aliran listrik. Kehati-hatian juga disampaikan oleh General Manager PT.PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, bapak Doddy Benyamin Pangaribuan. Dalam seminar yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Riau di Rektorat.

Pansus yang dibentuk oleh DPRD Kota Pekanbaru yang di ketuai oleh Bapak Muhammad Sabarudi,ST menyatakan pihak PT.PLN tidak serius dalam mengatasi krisis listrik yang terjadi sehingga pemadaman terjadi cukup lama. Saat krisis DPRD Kota Pekanbaru telah berulang kali memanggil pihak PLN dalam mengatasi tersebut, namun jawabannya tetap sama. Pansus pun berpendapat bahwa pihak PLN dalam menanggapi tuntutan hanya mencari jawaban aman saja.

Selain itu penulis juga melihat ketidak seriusan tersebut dari program jangka pendek yang dibuat saat krisis. Dari 6 program yang mereka canangkan untuk

mengatasi krisis pada tahun 2013 kemarin saat penulis Tanya kembali program tersebut yang sudah siap baru sewa PLTMG Teluk Lembu. Hal tersebut juga menggambarkan bahwa dalam menghadapi krisis PLN memang member harapan kepada masyarakat tanpa serius untuk mengerjakannya.

4.PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang penulis jabarkan di bab III, penulis mengambil berapa kesimpulan terkait hal tersebut:

1. Krisis yang terjadi di kota Pekanbaru telah mengindikasikan akan kurang baiknya kinerja PT.PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Ketidaksiapan pembangkit yang telah direncanakan untuk menekan defisit yang dialami oleh sistem Riau menjadi faktor utama. Hal tersebut tidak sebanding dengan pertumbuhan beban yang cepat dengan pertumbuhan pelanggan dan kebutuhan akan tenaga listrik.
2. Lambatnya penanganan krisis sehingga berlangsung cukup lama disebabkan tidak bisanya dilakukan interkoneksi terhadap sistem Riau karena karena permasalahan pembangkit dan krisis yang dialami sistem lain. PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau hanya melakukan penyewaan pembangkit dalam skala kecil akibat ketakutan yang dialami oleh manajemen PT.PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dalam mengambil kebijakan saat krisis karena dibayangi akan inefisiensi anggaran.

4.2 Saran

Sesuai penelitian dan analisis yang penulis buat dalam analisis ini penulis ingin memberikan beberapa saran yakni:

1. Defisit daya yang dialami oleh sistem Riau yang dapat berdampak besar bagi pelanggan listrik harus ditangani secara serius oleh pihak PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Perencanaan yang dibangun dan diproyeksikan oleh PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau menurut penulis sudah baik hanya perlu upaya yang kuat dalam menyelesaikan target pembangunan sesuai tepat waktu. Menurut penulis dengan semakin tingginya beban puncak sistem Riau perlu program luar biasa percepatan pembangunan pembangkit agar tidak terjadi krisis kembali. Jangan menjadikan sistem interkoneksi sebagai upaya utama dalam penyediaan tenaga listrik.
2. Manajemen krisis yang kurang maksimal seharusnya menjadi hal prioritas ditengah krisis yang berlangsung. Hak-hak konsumen harus menjadi perhatian pihak PT.PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Sehingga terjadi hal yang sama menguntungkan dimana PLN bisa menambah pelanggan tanpa mengabaikan hak konsumen yang terlantar nantinya. Seharusnya hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan harus menjadi perhatian pihak PT.PLN (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau. Selama kebijakan yang diambil tidak menguntungkan perseorangan atau kelompok tidak ada yang harus ditakuti dalam mengambil kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Mariam. 2009. *“Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Iskandar. 2009. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Gaung Persada Press. Jakarta
- Keban, Terenias T. 1995. *“Indikator Kinerja Pemerintahan Daerah: Pendekatan Manajemen dan kebijakan Seminar Sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik”*. UGM. Yogyakarta
- Mangkunegara, A. Anuar Palu. 2010. *“Evaluasi Kinerja SDM”*. Refika Adita. Bandung
- Macaulay, Steve, Sarah Cook. 1997. *“How To Improve Your Customer Service, Kiat Meningkatkan Pelayanan Bagi Pelanggan”*, Terjemahan Yoshua Sambodo. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Suyanto, Sutinah dan Bagong. 2011. *“Metodologi Penelitian Sosial”*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta
- Agoes, Wempy. 2011. *“Dinamika Kepentingan Lokal: Studi kasus Implementasi Kebijakan Penyediaan Tenaga Listrik di Provinsi Riau Tahun 2009-2010”*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UR. Pekanbaru
- Setiawan, Bambang. 2007. *“Analisis Kualitas Pelayanan Penumpang Pada Bandara Sultan Syarif Kasim II PT. Angkasapura Persero Bandara SSK II Pekanbaru”*. Skripsi Jurusan Administrasi Negara FISIP UR. Pekanbaru

Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Jurnal Riset oleh Moh. Nurhadi Cahyono dan Fajar Judisiawan “Menilik Alat ukur Kinerja BUMN tahun 2011”

Web:

www.ptpln.or.id

Tribunnews.com tanggal 16 Oktober 2013

www.beritasatu.com tanggal 7 Oktober 2013